

**BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG**



**RENCANA KERJA (RENJA)  
PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk Tahun ke-Kesatu Periode Rencana Strategis 2024 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini mengikuti rekomendasi perencanaan sesuai dengan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 yang penyusunannya menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti pedoman penyusunan untuk Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 berjalan. Adapun Tujuan dan Sasaran Kinerja pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini mencakup Indikator Kinerja Utama yang telah dievaluasi pada akhir Tahun dengan sasaran Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Kualitas Pelayanan khususnya Pelayanan Pajak Daerah. Dari beberapa formulasi tersebut Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Belitung Tahun 2024 telah diarahkan untuk dapat mendukung arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Tanjungpandan, Agustus 2024

KETUA BADAN,  
  
ISKANDAR FEBRO, SH., MM  
Pengguna Utama Muda / IV.c  
NIP. 196502141999031002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	ii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung ....	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	18

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	24

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	25
--	----

### BAB V PENUTUP

## **DAFTAR TABEL / BAGAN**

Tabel 2.1.a	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Pencapaian Renstra .....	10
Tabel 2.1.b	Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	12
Tabel 3.2.1	Tujuan Rencana Kerja OPD .....	24
Tabel 4.1.a	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran Perubahan 2024.....	25
Tabel 4.1.b	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung .....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) untuk periode 5 ( Lima ) tahunan Sebagai salah satu acuan bagi Perangkat Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap Visi dan Misi Daerah dalam kurun waktu 1 (satu ) Tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini telah menjadi prioritas untuk memenuhi sasaran Pembangunan dalam hal ini Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Belitung sebagai salah satu bagian dari unsur penunjang urusan Pemerintah bidang urusan Keuangan mempunyai Peran dan Kewenangan dalam Mengelola Pendapatan Daerah untuk itu perlu melaksanakan program-program kerja secara efektif dan efisien yang harus dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan Pembangunan Daerah dalam hal ini Daerah Kabupaten Belitung.

Arah Kebijakan Tahunan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur dan terstruktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan tersebut diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat menentukan arah kebijakan tahunan, yang menjadi prioritas arah kebijakan pencapaian

sasaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya dan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan harus melalui tahap evaluasi dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya, Badan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah juga telah mengkaji beberapa isu Strategis didalam pengelolaan Pendapatan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah tahun 2024 di Kabupaten Belitung, untuk itu disusunlah Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 yang dalam proses penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

## **I.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung

- Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8);
  13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 62)
  14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 18)

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi seluruh aparat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran 2024 yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah dimilikinya rencana operasional untuk implementasi kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, sehingga tercapai pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien dengan merumuskan rencana Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan pada tahun 2024

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024 sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

#### 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

### **4.1. Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung dibuat sesuai dengan Perencanaan Tahun 2023 berdasarkan Tujuan Sasaran strategis yang telah ditetapkan dan diukur dengan pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan persentase dan tingkat capaian Realisasi Anggaran pada program / kegiatan. Indikator Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah
2. Tingkat Pencapaian target penerimaan pendapatan daerah
3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

##### **a. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu**

Pencapaian target pendapatan daerah kabupaten Belitung meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 186.621.508.495,- atau sebesar 126,83 % dari anggaran yang yang ditetapkan sebesar Rp. 147.139.608.350,- Selain itu penerimaan dari dana Transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dengan capaian realisasi sebesar 102,52% atau sebesar Rp. 920.148.463.207,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 897.489.400.967,-. Sedangkan untuk Realisasi dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasinya sebesar Rp. 10.669.847.206,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.221.536.448,- dan pencapaiannya sebesar 95,08 %.

**Tabel 2.1.a**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung s/d Tahun 2023**

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	KET.
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>147.139.608.350</b>	<b>186.621.508.495</b>	<b>126,83</b>
	Pajak Daerah	80.797.248.000	94.099.943.027	11,46
	Retribusi Daerah	10.520.950.339	12.144.891.525	115,44
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.035.003.956	6.035.003.956	100,00
	Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.786.405.995	74.341.669.986	149,32
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>897.489.400.967</b>	<b>920.148.463.207</b>	<b>102,52</b>
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil bukan Pajak	118.040.689.000	136.611.970.768	115,73
	Dana Alokasi Umum	469.570.334.000	469.430.528.687	99,97
	Dana Alokasi Khusus	161.351.649.000	154.337.108.337	95,65
	Dana Insentif Daerah	41.029.718.000	41.029.718.000	100,00
	Dana Desa	41.042.594.000	40.466.853.100	98,60
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.454.416.967	78.272.284.315	117,78
<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11.221.536.448</b>	<b>10.669.847.206</b>	<b>95,08</b>
	Pendapatan Lainnya Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan	11.221.536.448	10.669.847.206	95,08
	<b>Jumlah</b>	<b>1.055.850.545.765</b>	<b>1.117.439.818.908</b>	<b>103,67</b>

Total pagu dana yang dilaksanakan untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan baik belanja langsung maupun belanja tidak

langsung pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 sebesar Rp. 13.258.701.280,-. Adapun Program dan Kegiatanyang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

**Program dan kegiatan :**

**1. Program**

Adapun program operasional Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Belitung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Pengelolaan Pendapatan Daerah

**2. Kegiatan.**

Kegiatan – kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan program yang telah di tentukan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Pengelolaan Perbandaharaan Daerah
9. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum pencapaian kegiatan tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik, hal ini terlihat dari 9 (Sembilan) kegiatan yang ada

dapat terlaksana dengan baik dengan Realisasi Keuangan sebesar 9.385.885.591,- atau sebesar 70,79% dari pagu dana sebesar Rp. 13.258.701.280,- .

**b. Capaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan**

Target dan Realisasi Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 dibuat berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis. Adapun Realisasi Penerimaan Daerah dijabarkan dengan membandingkan perolehan penerimaan Daerah dengan Target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.b.  
Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke	Realisasi
				2023	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan penerimaan pendapatan daerah		Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	30,47 %	15,46%
		Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Tingkat Pencapaian target penerimaan pendapatan daerah	100 %	105,57%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	3.55 Sangat Baik	3,47 Baik

**Indikator Sasaran 1 : Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2023;**

Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah di Formulasi dengan kondisi realisasi penerimaan Tahun 2018 sebagai tahun awal untuk menggambarkan kenaikan Penerimaan Daerah sesuai periode Renstra untuk tahun 2018 – 2023.

Perhitungan ini disesuaikan dengan indikator kinerja sasaran 1 yaitu Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang mempunyai formulasi perhitungan (capaian penerimaan tahun n – capaian penerimaan tahun awal) / capaian penerimaan tahun awal x 100%.

**Indikator Sasaran 2 : Tingkat Pencapaian target penerimaan pendapatan daerah Tahun 2023;**

Indikator Sasaran 2 yaitu Tingkat pencapaian target penerimaan pendapatan Daerah yang mempunyai formulasi perhitungan yaitu  $((\text{Penerimaan Pendapatan Tahun } n - \text{Penerimaan Pendapatan Tahun } (n-1)) / \text{Penerimaan Pendapatan Tahun } (n-1)) \times 100 \%$

Dari kedua Indikator diatas Capaian penerimaan Daerah tahun 2023 sebesar 105,57% tetapi secara kuantitatif mengalami peningkatan realisasi, hal ini disebabkan oleh berkurangnya aktifitas usaha masyarakat dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah pusat seperti diketahui Aktifitas ini sangat menunjang Penerimaan Daerah terutama dari PAD.

**Indikator Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah;**

Berdasarkan Hasil SKM nilai mutu pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung adalah 3.47 dengan nilai konversi mencapai 97,75 %, sedangkan kinerja unit pelayanan

menyandang nilai baik. sedangkan target untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pada Tahun 2023 senilai 3,55 %, namun realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,47 atau 97,75%.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Keberhasilan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dapat di indikasikan dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pelayanan yang diberikan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ke masyarakat yang ditandai dengan pelaksanaan semua program rutin yang dilaksanakan.

Pada Tahun 2023 Program rutin yang dilaksanakan meliputi Program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 Unit Pelayanan yang diemban Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung ditandai dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) sebesar 3.47 atau 97,75% yang artinya Mutu Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung berkategori baik. Adapun formulasi capaian tersebut sebagai berikut :

Total dari nilai persepsi per unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang.

Dimana : Bobot nilai rata2 tertimbang = (jumlah bobot / jumlah unsur)  
=  $1/9 = 0,11$

Nilai Persepsi Nilai Interval (NI)

1 1,00 – 2,5996

2 2,60 – 3,064

3 3,0644 – 3,532

4 3,5324 – 4,00

Beberapa faktor yang dalam mencapai perolehan tersebut adalah :

1. Kebijakan yang sesuai dan dapat di implementasikan dari beberapa kebijakan yang langsung berkenaan dengan Masyarakat dalam kepengurusan Kewajiban Pajak Daerah.
2. Pengawasan Pelayanan yang diupayakan berjalan dengan baik dan sesuai Standar Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
3. Pelatihan Keterampilan teknis dalam bentuk Pelatihan terutama dalam Pengelolaan Pajak Daerah maupun dalam bentuk Sosialisasi kepada masyarakat.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik dan efisien, seperti Tata Arsip yang memadai telah membantu dalam mempercepat ketaausahaan atau administrasi Pelayanan.
5. Komitmen aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Subjek Penerimaan Daerah.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD diukur dari tingkat kinerja dan pelayanan, untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi SKPD maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

#### **Permasalahan**

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dikarenakan penjabaran dan analisa kinerja yang didasari oleh pendekatan kinerja memerlukan pembinaan dan koordinasi yang berkala sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan, sasaran dan petunjuk dari kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber penunjang PAD.

3. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur sebagai sumber daya modal untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja pegawai.
4. Pendampingan dan pengawasan oleh pihak terkait dalam membantu proses penarikan pajak Daerah sebagai wadah koordinasi dalam memaksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Kesesuaian Rencana Kebutuhan Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan kebijakan perencanaan secara menyeluruh untuk seluruh OPD Kab. Belitung

### **Hambatan**

1. Pengurangan Aktivitas lapangan dalam pengelolaan Pajak Daerah dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca penyebaran Covid 19
2. Jumlah Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Belitung

### **Tantangan**

- a. Penyesuaian Kebijakan Pusat dan Daerah yang dapat di Aplikasikan sesuai dengan kondisi Daerah Kab. Belitung terutama bagi badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Lembaga Pengelola Pendapatan
- b. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari sumber-sumber lain yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sesuai hak Daerah.
- c. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas diantaranya wilayah pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Belitung dalam menjangkau Objek Penerimaan Daerah
- d. Perbaikan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel
- e. Pembinaan kepada Lembaga, Instansi, Subjek Penerimaan atau BPPRD sendiri selaku Pengelola Penerimaan Kabupaten Belitung

Tugas dan kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah adalah sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah, dari fungsi

tersebut maka ditentukan / ditetapkan issue Strategis berdasarkan yaitu :

1. Pertumbuhan Kawasan Pariwisata Kabupaten Belitung yang diiringi dengan Pertumbuhan Objek-Objek Pajak Daerah
2. Belum Optimalnya pengelolaan Potensi Pajak Daerah
3. Penerapan dan Pemutahiran Kebijakan Pajak Daerah
4. Berkembangnya Teknologi dan Informasi sektor perpajakan daerah

**Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak-lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.**

1. Ekstensifikasi Pajak dengan Adanya Pemeriksaan Pajak daerah, Evaluasi dan pemutakhiran Nilai jual objek pajak untuk pajak PPP - P2 dan BPHTB untuk menyesuaikan nilai perolehan Pajak Daerah
2. Intesifikasi Pajak Daerah untuk perluasan Pendataan Pajak Daerah Untuk seluruh potensi Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Belitung.
3. Pengoptimalan Monitoring / Pengawasan dan Koordinasi dalam pengelolaan Pajak Daerah selain Pendapatan Asli Daerah (Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah).

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Analisis kebutuhan BPPRD mendapati beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung.

Adapun beberapa kebutuhan tersebut antara lain pada belanja Rutin yaitu untuk belanja alat komponen listrik mengingat keberadaan Gedung Kantor BPPRD Kabupaten Belitung sudah Melewati 3 Tahun. Kebutuhan ini memerlukan kegiatan baru dan keperluan untuk kegiatan ini tidak ada di Rancangan Awal RKPD. Adapun kesesuaian program dirasakan telah sesuai namun ada beberapa besaran

perkiraan plafon anggaran program baru tersebut belum sesuai dengan kebutuhan anggaran.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung merupakan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat yang diarahkan untuk kepentingan prioritas/sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan. Pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, serta fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2014.

Melalui mekanisme yang dijalankan telah ditentukan program dan kegiatan pada tahun berkenaan, Adapun Program dan kegiatan yang diusulkan antara lain :

### **1. Program**

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan maka ditetapkan program kegiatan, adapun program operasional Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Pengelolaan Pendapatan Daerah

## **2. Kegiatan.**

Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan program yang telah di tentukan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah

## **2. Sub Kegiatan.**

Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan kegiatan yang telah di tentukan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
10. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pengadaan Mebel
21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22. Penyediaan jasa Surat – Menyurat
23. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
25. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
29. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
30. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
31. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

32. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
33. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
34. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung mempunyai tujuan yang sarat dengan tujuan daerah untuk mencapai pembangunan daerah, pencapaian ini dilakukan dengan memaksimalkan penerimaan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan beberapa kebijakan yang sesuai dan telah di evaluasi, sedangkan pencapaian sasaran ditempatkan sebagai alokasi sumber daya yang terukur dengan melaksanakan instrument program, kegiatan serta sub Kegiatan yang diarahkan sesuai dengan Kebijakan Nasional.

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat. Adapun Sasaran strategis dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan yang ingin dicapai yaitu penerimaan pajak negara yang optimal dan Sasaran strategis dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan yaitu SDM yang kompetitif

Adapun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mendukung arah kebijakan tersebut sesuai tugas dan fungsi adalah membuat arah kebijakan dengan menjaga keterpaduan kebijakan dengan kebijakan provinsi yang mengacu kepada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ingin di capai yaitu penerimaan pajak negara yang optimal dan Sasaran strategis dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan yaitu SDM yang kompetitif.

Adapun Tugas BPPRD yaitu Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain

pendapatan daerah dan 4 fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pelaksanaan tugas lain yang diperikan oleh kepala daerah

Tinjauan yaitu penguatan kelembagaan untuk SDM yang kompetitif dan diturunkan menjadi Sasaran dari Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu menjadikan birokrasi yang bersih, Efisien, Akuntabel dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong untuk permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu terbatasnya kuantitas tenaga atau Sumber Daya Aparatur yang professional pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung dan Faktor Pendorong nya adalah Dukungan Peningkatan Kompetensi Perpajakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung.

Sedangkan Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai sasaran untuk peningkatan Belanja Pemerintah Daerah yang merupakan turunan dari sasaran dari Renstra KL Kementerian Keuangan yaitu pencapaian penerimaan pajak negara yang optimal mengidentifikasi permasalahan Pelayanan dalam memaksimalkan penerimaan Daerah Khususnya PAD dalam mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

Hambatan dalam Memaksimalkan Penerimaan jika ditinjau dari sasaran tersebut adalah kesadaran Masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan koordinasi dengan pihak terkait sedangkan faktor pendorongnya adalah pembinaan kepada wajib pajak dan koordinasi yang berkala dengan pihak yang terkait dengan koordinasi Penerimaan daerah baik Perorangan ataupun Lembaga dan Pemutakhiran dalam perluasan data dan Penetan Nilai dari Objek Pajak

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.2.1 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.1**

#### **Tujuan Rencana Kerja OPD**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>
Meningkatkan Pelayanan Birokrasi yang bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya kualitas pengelolaan penerimaan pendapatan daerah

#### **III.2.2 Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan kedepan.

Adapun sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Selain PAD

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya, agar tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu ditetapkan instrument kebijakan, program, dan kegiatan agar dapat berkesinambungan antara efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Anggaran dari dari tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, dapat dicapai dengan efektivitas dan efisiensi melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Untuk itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, telah menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana uraian berikut :

#### 4.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan

Adapun program operasional Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1.a**

#### **Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li><li>▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li><li>▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li><li>▪ Kordinasi Penyusunan DPA SKPD</li><li>▪ Kordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD</li><li>▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>▪ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>▪ Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>▪ Penyediaan Bahan</li> </ul>

			<p>Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Mebel</li> <li>▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>
2.	Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi, Fasilitasi,</li> </ul>

	Daerah	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</li> <li>▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</li> <li>▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</li> <li>▪ Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</li> <li>▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ul>

**Tabel 4.1.b**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG**  
**TAHUN 2024 (APBD PERUBAHAN)**

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2				3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan												
5	02				Bidang Urusan Keuangan												
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	7.825.727.774	8.020.927.941	195.200.167			100%	8.524.435.000	BPPRD
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		75%	75%	75%	63.648.000	63.648.000	-			75%	63.500.000	BPPRD	
				3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		100%	100%	100%	2.576.323.765	2.610.411.065	34.087.300			100%	3.023.900.000	BPPRD	
				4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	100%	407.917.478	750.018.878	342.101.400			100%	642.300.000	BPPRD	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	2.949.048	2.949.048	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	3.175.000	BPPRD
				Hasil : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai peraturan		100%	100%	100%							100%		
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	699.633	699.633	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	725.000	BPPRD
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	349.983	349.983	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	400.000	BPPRD
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	349.983	349.983	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	400.000	BPPRD

NO	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2					3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	349.983	349.983	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	400.000	BPPRD
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	349.983	349.983	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	400.000	BPPRD
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	849.483	849.483	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Laporan	850.000	BPPRD
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7.822.778.726	8.017.978.893	195.200.167	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	8.521.260.000	BPPRD
							Hasil : Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai peraturan	100%	100%	100%								
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	7.821.579.260	8.016.779.427	195.200.167	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Orang/Bulan	8.520.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	724.608	724.608	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	740.000	BPPRD

NO	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	474.858	474.858	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	520.000	BPPRD
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	5 Orang	4 Orang	63.648.000	63.648.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	63.500.000	BPPRD
							Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%						100%		
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	18.648.000	18.648.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	11.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	5 Orang	4 Orang	45.000.000	45.000.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	52.500.000	BPPRD
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.018.668.765	1.052.756.065	34.087.300	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	1.141.800.000	BPPRD
							Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%						100%		

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2				3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	10.583.850	10.583.850	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	12.500.000	BPPRD
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	122.038.950	156.126.250	34.087.300	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	150.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	13.320.000	13.320.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	8.600.000	BPPRD
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	280.200.600	280.200.600	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	324.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	54.025.365	54.025.365	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	62.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.700.000	BPPRD

NO	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2					3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	535.000.000	535.000.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	580.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jenis Barang Milik Daerah	14 Jenis	4 Jenis	6 Jenis	14.319.000	348.867.900	334.548.900	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Jenis	217.300.000	BPPRD
							Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%						100%		
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	9 Unit	1 Unit	-	15.000.000	15.000.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	52.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	3 Unit	10 Unit	14.319.000	333.867.900	319.548.900	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	165.300.000	BPPRD
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	1.557.655.000	1.557.655.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100%	1.882.100.000	BPPRD
							Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%						100%		

NO	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2					3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.200.000	9.200.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	10.100.000	BPPRD
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	350.000.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	415.000.000	BPPRD
	2	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.198.455.000	1.198.455.000	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.457.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	35 Jenis	2 Jenis	12 Jenis	393.598.478	401.150.978	7.552.500	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 Jenis	425.000.000	BPPRD
							Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%						100%		
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	57 Unit	18 Unit	18 Unit	167.541.650	167.541.650	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	29 Unit	175.000.000	BPPRD
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	121 Unit	35 Unit	38 Unit	63.236.700	124.735.200	61.498.500	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Unit	90.000.000	BPPRD

NO	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2					3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	162.820.128	108.874.128	(53.946.000)	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	160.000.000	BPPRD
	5	02	02			Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	100%	100%	100%	288.074.090	288.074.090	-			100%	435.000.000	BPPRD
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Keluaran : Lapran dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	288.074.090	288.074.090	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	435.000.000	BPPRD
							Hasil : Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100%						100%		
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	36 Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	288.074.090	288.074.090	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	435.000.000	BPPRD

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2				3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	
	5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,60%	-2,77%	5,18%	2.528.188.593	2.514.288.693	(13.899.900)	Kab. Belitung		21,74%	2.530.255.000	BPPRD	
	5	02	04	2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keluaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	2.528.188.593	2.514.288.693	(13.899.900)	Kab. Belitung		41 Jenis PAD	2.530.255.000	BPPRD	
						Hasil : Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%						100%			
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Lapran Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	729.875.815	729.875.815	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Laporan	620.000.000	BPPRD
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	18 Unit	5 Unit	5 Unit	306.781.800	306.781.800	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	310.000.000	BPPRD
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	373.152.128	395.727.128	22.575.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Laporan	398.430.000	BPPRD
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHBTB)	Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	81300 Objek Pajak	79488 Objek Pajak	78148 Objek Pajak	765.068.850	765.068.850	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	79800 Objek Pajak	790.525.000	BPPRD

NO	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2024	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	305.791.600	269.316.700	(36.474.900)	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	358.000.000	BPPRD
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47.518.400	47.518.400	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	53.300.000	BPPRD
<b>Jumlah Total</b>											<b>13.689.879.700</b>	<b>14.247.368.667</b>	<b>557.488.967</b>				<b>15.219.390.000</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Pengelolaan Penerimaan / Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung memerlukan perencanaan yang didasarkan pada kewenangan Otoritas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan pedoman Kebijakan Pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung sebagai Istansi pengelola pendapatan daerah melakukan kajian implementasi kebijakan dari periode sebelumnya dan mempertimbangkan koordinasi teknis untuk mengembangkan rencana kebijakan yang diperlukan untuk tahun 2024 akan datang. Adapun penjelasan Tujuan, Sasaran yang menyertai rencana anggaran telah dijelaskan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung dengan perkiraan kinerja yang akan dicapai dalam rencana perubahan strategis untuk periode tahun 2024 -2026.

Oleh Karena itu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung sangat memerlukan dukungan dari semua pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan isi Rencana Kerja ini dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tanjungpandan, Agustus 2024

KEPALA BADAN,  
  
**ISKANDAR FEBRO, SH., MM**  
Kepala Muda / IV.c  
NIP. 196502141999031002

